

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa PAD berkorelasi positif namun tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik. Hal ini terkonfirmasi dari nilai koefisien regresi sebesar 0,052 dengan tingkat signifikansi 0,175 ($p > 0,05$), sehingga hipotesis penelitian ini tidak terdukung. Lebih lanjut, kontribusi PAD dalam menjelaskan variabilitas kinerja keuangan daerah tergolong marginal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,018 atau 1,8%. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas variasi performa keuangan dipengaruhi oleh determinan lain di luar model penelitian. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa kinerja keuangan daerah belum bertumpu sepenuhnya pada PAD, melainkan masih didominasi oleh dependensi fiskal terhadap dana transfer pusat serta adanya disparitas kapasitas fiskal antarwilayah.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan

dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel penelitian yang terbatas

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada penggunaan variabel independen tunggal (PAD), yang mengakibatkan kemampuan model dalam menjelaskan kinerja keuangan daerah menjadi kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien determinasi (R^2) yang rendah, yang mengisyaratkan bahwa masih terdapat banyak variabel esensial lainnya yang belum tercakup dalam analisis. Dengan demikian, model penelitian ini belum sepenuhnya mampu mempresentasikan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

2. Penggunaan data agregat tingkat provinsi

Penelitian ini menggunakan data keuangan pada tingkat provinsi, sehingga belum dapat menangkap variasi yang lebih rinci pada level kabupaten/kota. Sementara itu, karakteristik fiskal antar daerah pada tingkat yang lebih kecil tersebut cenderung memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

3. Periode penelitian yang relatif singkat

Keterbatasan temporal penelitian ini, yang hanya mencakup periode 2021–2023, mengakibatkan gambaran mengenai dinamika jangka panjang kinerja keuangan daerah menjadi kurang optimal. Dengan demikian, interpretasi atas temuan penelitian ini perlu mempertimbangkan konteks waktu yang

terbatas, di mana hasil yang diperoleh mungkin akan menunjukkan pola yang berbeda jika dilakukan pada rentang periode yang lebih panjang.

5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Otoritas lokal disarankan untuk melakukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan kuantitas PAD, tetapi juga pada penguatan tata kelola keuangan yang berbasis efisiensi dan efektivitas belanja. Selain itu, diperlukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan guna membangun kemandirian fiskal yang lebih kokoh.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan pemberian insentif bagi daerah yang mampu meningkatkan PAD.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti dana transfer pemerintah pusat, belanja daerah, efisiensi anggaran, serta variabel tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat

menggunakan metode analisis yang lebih kompleks, seperti regresi panel atau model multivariat, agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5.3 Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis maupun praktis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai desentralisasi fiskal dan Agency Theory yang menjelaskan bahwa kualitas tata kelola keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mengendalikan sumber daya secara optimal.

2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan PAD perlu diimbangi dengan penguatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian belanja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar peningkatan kapasitas fiskal dapat diikuti oleh peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan.

Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan kapasitas pengelolaan keuangan, bukan hanya melalui peningkatan penerimaan daerah.